



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2019

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2019

ISBN	978-602-6732-65-1
Nomor Publikasi	14020.2103
Katalog	4601001.1402
Ukuran Buku	18.2 cm x 25.7 cm
Jumlah Halaman	xii + 42 halaman
Naskah	Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu
Gambar Kulit	Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu
Diterbitkan oleh	©Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu
Dicetak oleh	GMedia
Sumber Ilustrasi	Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Drs. Morhan Tambunan, M.Si

Penyunting

Dede Firmansyah, SST

Penulis

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

Pengolah Data

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

Pembuat Infografis

Nurhasanah Dwi Putri, S.Tr.Stat

<https://inhukab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak-Nya Statistik Politik dan Keamanan 2019 dapat diselesaikan. Statistik Politik dan Keamanan merupakan publikasi dari Seksi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

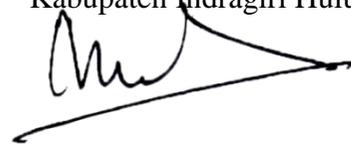
Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2019, mengulas mengenai keadaan politik pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari jumlah anggota DPRD, peraturan daerah yang dihasilkan DPRD, hingga jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian juga membahas mengenai keamanan Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari kantor dan personil polisi hingga jumlah kejadian kejahatan menurut kelompok kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2018-2019.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Rengat, Desember 2020

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Indragiri Hulu



Drs. Morhan Tambunan, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Pengumpulan Data.....	9
2.3 Konsep Definisi.....	10
2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik.....	10
2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan.....	10
2.4 Penjelasan Teknis.....	11

BAB III. POLITIK.....	13
3.1 Kondisi Penduduk.....	15
3.2 Lembaga Demokrasi.....	16
3.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	17
3.3.2 Organisasi Masyarakat/LSM.....	20
BAB IV. KEAMANAN.....	23
4.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	25
4.2 Indikator Utama Kejahatan.....	27
4.3 Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Indragiri Hulu.....	29
4.4 Korban Kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	31
BAB V. PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan.....	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Hal
	.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.....	16
Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	19
Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019.....	20
Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019.....	21
Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019.....	25
Gambar 7. Rasio Penduduk per Polisis di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019.....	26
Gambar 8. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Kejahatan Diselesaikan (Crime Cleared) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019.....	28
Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Lampiran	Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) Menurut	37
1.	Kelompok Kejahatan Tahun 2018-2019.....	
Lmapiran	Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan	40
2.	Kelompok Kejahatan Tahun 2018-2019.....	

1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Politik dan kemanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling memengaruhi. Ada kalanya situasi politik di suatu wilayah akan memengaruhi keamanan di wilayah tersebut, atau sebaliknya situasi keamanan di suatu wilayah akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan-kebijakan politik di wilayah tersebut.

Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu, hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya.

Di sisi lain, seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Dimulainya era reformasi di Indonesia, memberi peluang pada penduduk Indonesia untuk lebih mudah dalam hal kebebasan berkumpul dan berpendapat. Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berpengaruh, baik langsung maupun tidak terhadap tingkat stabilitas keamanan dalam masyarakat.

Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Terkait hal tersebut, maka monitoring situasi politik dan keamanan di daerah menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu berupaya melakukan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2019. Diharapkan, publikasi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi mengenai gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai situasi politik dan keamanan terkini di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu,

tersedianya data statistik mengenai politik dan keamanan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari publikasi ini terdiri dari lima bab meliputi pendahuluan, metodologi, politik, keamanan, dan penutup.

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II Metodologi

Berisi tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep definisi yang digunakan.

Bab III Politik

Menjelaskan tentang kondisi politik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab IV Keamanan

Menjelaskan tentang kondisi keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang dibuat berdasarkan pembahasan pada politik dan keamanan.

2

METODOLOGI



BAB II

METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2019 ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2020 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu. Rincian data dan sumber publikasi data yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Kabupaten Indragiri Hulu dalam angka 2020 untuk mendapatkan data jumlah proyeksi penduduk tahun 2019.
2. Survei Statistik Politik dan Keamanan 2020 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan data jumlah anggota DPRD menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2019, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD tahun 2019, jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas)/lembaga swadaya masyarakat (LSM) tahun 2019, jumlah kantor polisi, jumlah personil polisi, jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Narasumber Survei Statistik Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan politik dan keamanan, antara lain Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Indragiri Hulu.

2.2 PENGUMPULAN DATA

Survei Statistik Politik dan Keamanan 2020 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu menjadi salah satu sumber data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2019. Data pada survei Statistik Politik dan Keamanan 2020 ini dikumpulkan

melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang masuk ke BPS Kabupaten Indragiri Hulu diolah menjadi tabel dan grafik yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2019.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminology yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik

- a. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
- c. Organisasi Masyarakat/LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya.

2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan

- a. Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap

tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

- c. Peristiwa yang diselesaikan oleh Kepolisian adalah:
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau lebih diserahkan kepada jaksa
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa
- d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- e. Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.4. PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya:

- a. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)

$$crime\ rate = \frac{Jumlah\ kejahatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ Penduduk} \times 100.000$$

Interpretasi: Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah

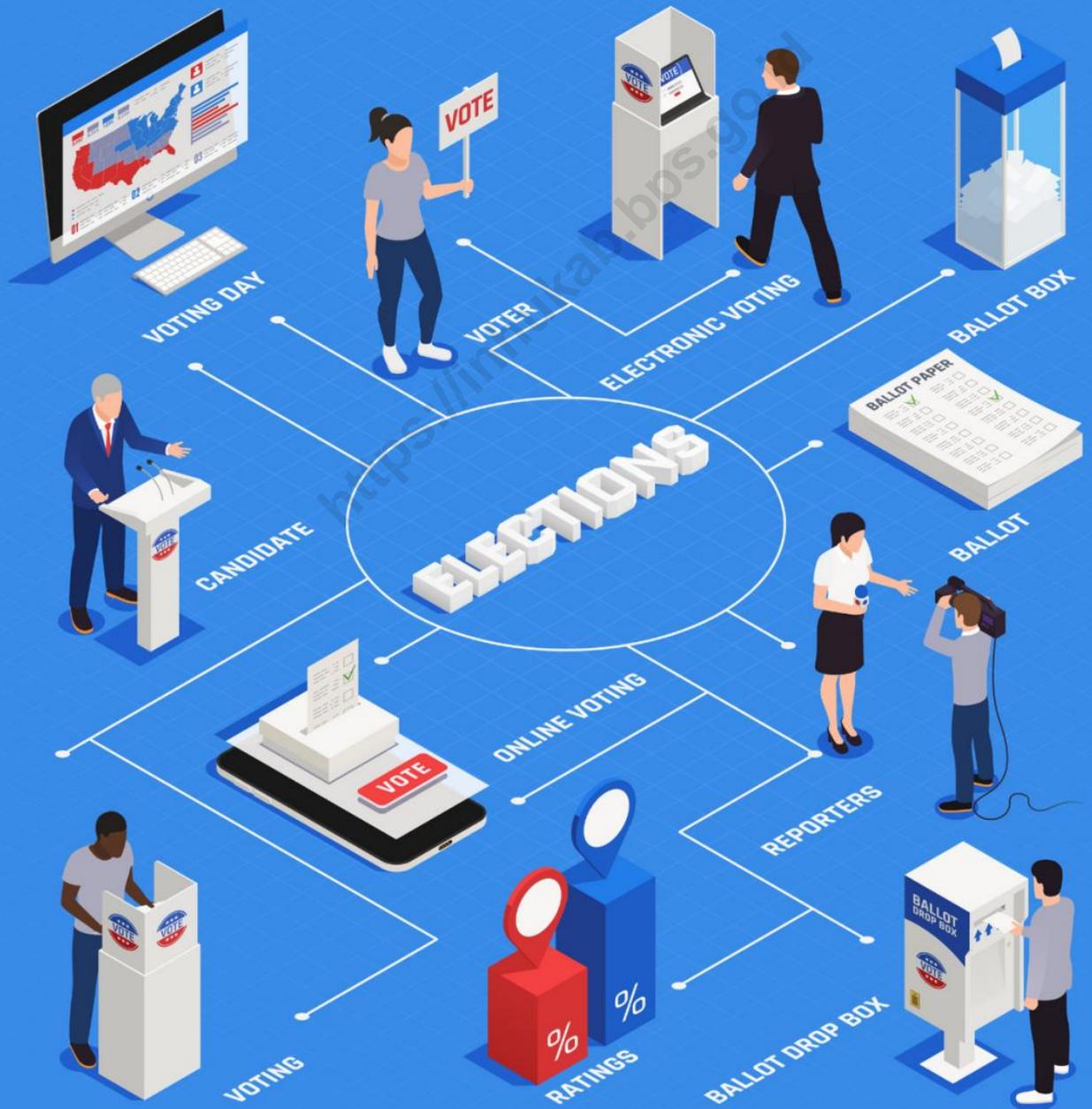
b. Persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{crime clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100.000$$

Interpretasi: Semakin tinggi berarti kinerja polisi semakin baik dalam menangani kasus

3

POLITIK



BAB III

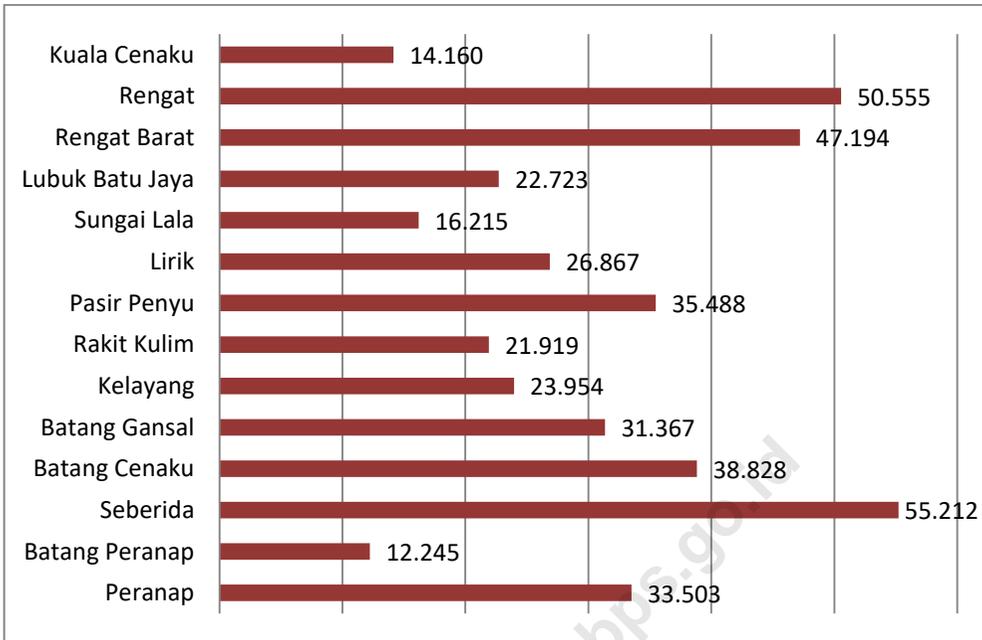
POLITIK

3.1 KONDISI PENDUDUK

Penduduk Indragiri Hulu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tersebar ke seluruh wilayah Indragiri Hulu yang memiliki luas mencapai 8.198.710 km², terbagi ke dalam 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 178 desa dan 16 kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu dapat diketahui melalui kegiatan Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Sensus Penduduk 2010 merupakan sensus penduduk yang terakhir dilakukan, sehingga untuk mengestimasi jumlah penduduk pada tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan penghitungan proyeksi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 untuk tahun 2019 adalah sebanyak 441.789 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,38 persen per tahun. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kecamatan Seberida sebanyak 55.212 jiwa, sedangkan Kecamatan Batang Peranap dengan jumlah penduduk sebanyak 12.245 jiwa menjadi kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam kegiatan politik, jumlah penduduk merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara. Dengan mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan suatu pemilu karena rakyat adalah pemegang kedaulatan secara penuh.



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk SP2010, BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

3.2 LEMBAGA DEMOKRASI

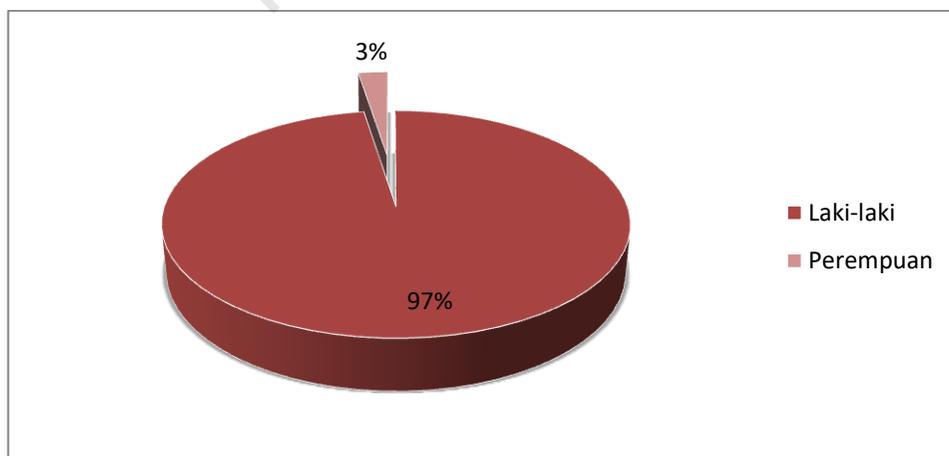
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk (1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jujur, (7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik

sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl 1971: 3).

Berdasarkan konsepsi tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai perantara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga formal yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama. Kelompok atau lembaga tersebutlah yang akan berperan dalam menjembatani kepentingan warga tersebut.

3.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

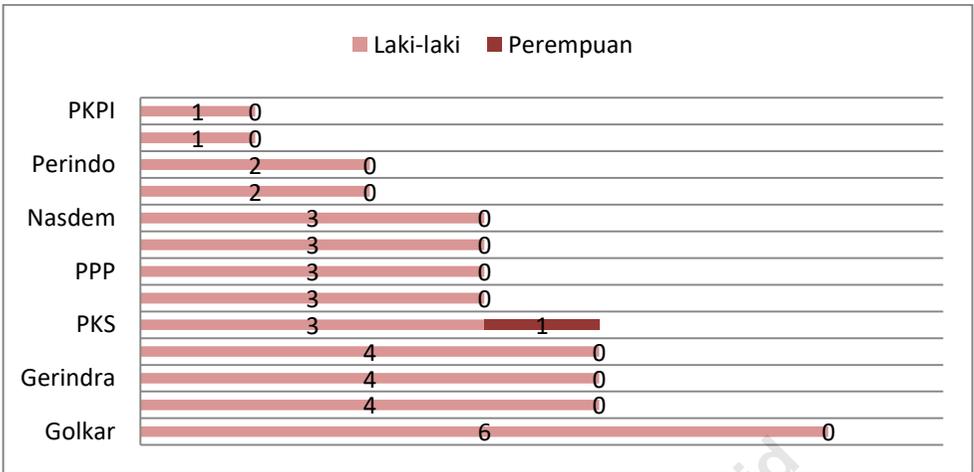
DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 memiliki 40 anggota, yang terdiri dari 39 laki-laki dan 1 perempuan. Gambar 2 menunjukkan persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 menurut jenis kelamin.



Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut jenis kelamin Tahun 2019

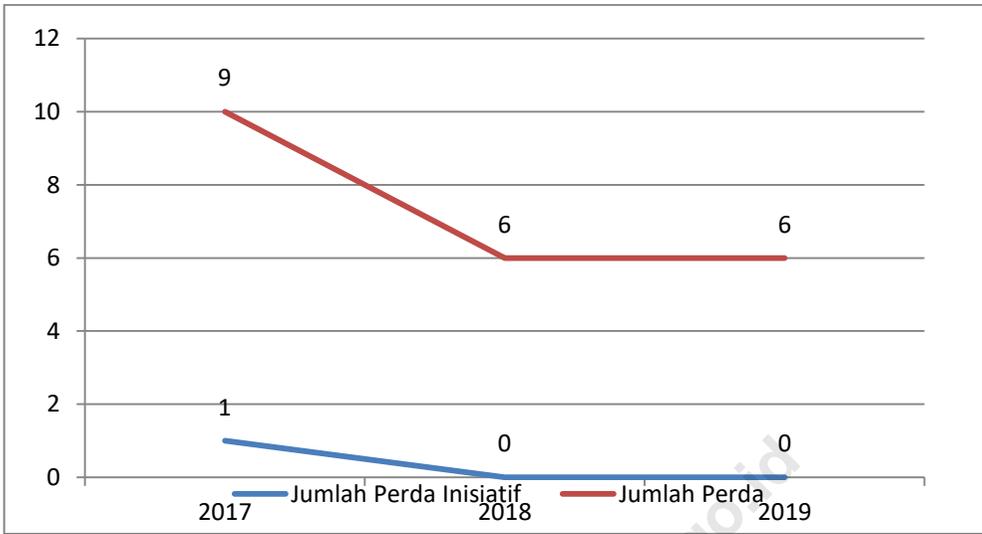
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa persentase anggota perempuan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu hanya sebesar 3 persen, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Indragiri Hulu masih di bawah persentase yang diharapkan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Maka, untuk pemilu selanjutnya partai politik harus memerhatikan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri hulu merupakan wakil dari tiga belas partai politik. Partai Golkar menjadi partai dengan perwakilan terbanyak, yaitu sebanyak enam orang, kemudian diikuti oleh PDIP, Gerindra, PKS, dan PBB dengan masing-masing diwakili oleh empat orang. Sedangkan partai Berkarya dan PKPI menjadi partai dengan perwakilan paling sedikit, yaitu sebanyak satu orang. Gambar 3 menunjukkan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin tahun 2019.



Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Salah satu peran DPRD adalah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Gambar 4, menunjukkan Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah Perda yang dihasilkan pada tahun 2017 sebanyak 9 Perda, turun menjadi 6 Perda untuk tahun 2018 dan 2019.



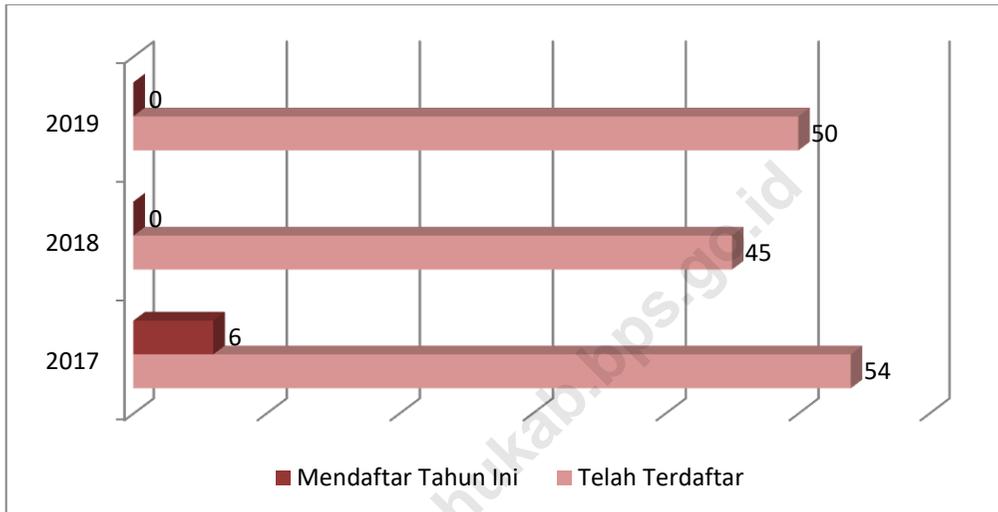
Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019

Dari sejumlah Perda yang dihasilkan, di dalamnya termasuk Perda Inisiatif, yaitu Perda yang dirancang berdasarkan inisiatif DPRD. Jumlah Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, hingga pada tahun 2019 tidak terdapat lagi Perda Inisiatif di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2.2 Organisasi Masyarakat/LSM

Berdasarkan data Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Indragiri Hulu yang di tunjukkan pada Gambar 5, memperlihatkan bahwa jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan tren yang cenderung statis. Tahun 2017 menunjukkan jumlah organisasi masyarakat/LSM sebanyak 54 organisasi, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 45 organisasi dan kembali meningkat menjadi 50 organisasi pada tahun 2019. Meskipun jumlah organisasi masyarakat/LSM mengalami peningkatan

kembali pada tahun 2019, tetapi tidak adak organisasi masyarakat/LSM yang baru mendaftar baik pada tahun 2019 maupun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membentuk organisasi masyarakat/LSM menurun.



Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019

Diperlukan sosialisasi oleh Bakesbangpol untuk meningkatkan aktifitas atau kegiatan organisasi masyarakat/LSM sehingga organisasi masyarakat tersebut dapat berjalan secara terus menerus sehingga masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, diperlukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat/LSM agar kegiatan organisasi bisa optimal, sehingga dapat lebih bermanfaat baik untuk anggota organisasi maupun untuk masyarakat sekitar.

4

KEAMANAN

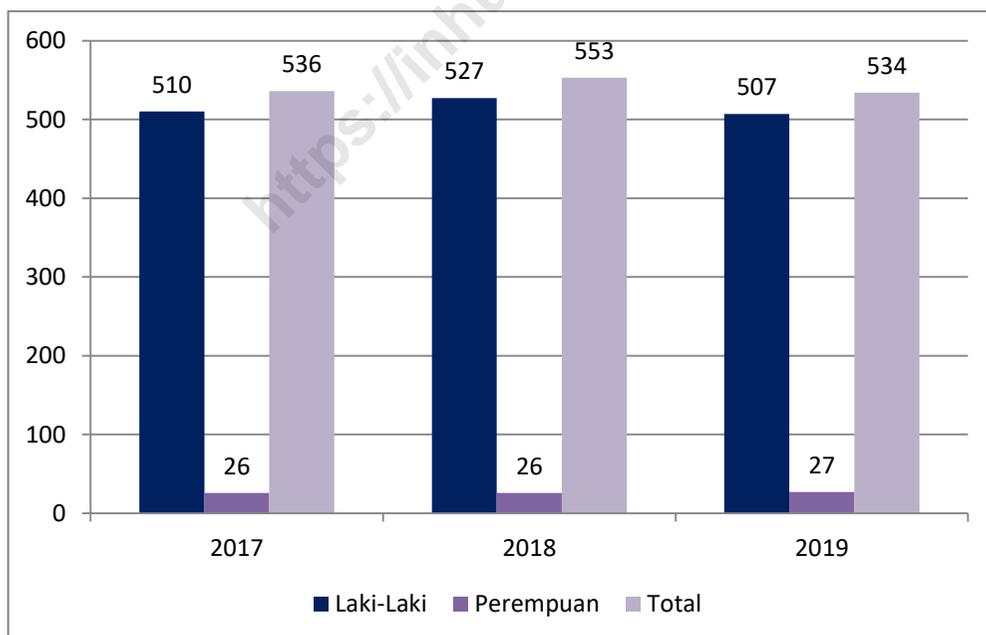


BAB IV KEAMANAN

4.1 SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH

Ketersediaan fasilitas dan jumlah personel keamanan suatu wilayah akan memengaruhi kondisi keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya adalah Polres, Polsek, dan pos polisi. Jumlah Polres, Polsek, dan pos polisi di Kabupaten Indragiri hulu tidak mengalami perubahan dari tahun 2017-2019 yaitu satu Polres, sepuluh Polsek, dan tujuh pos polisi.

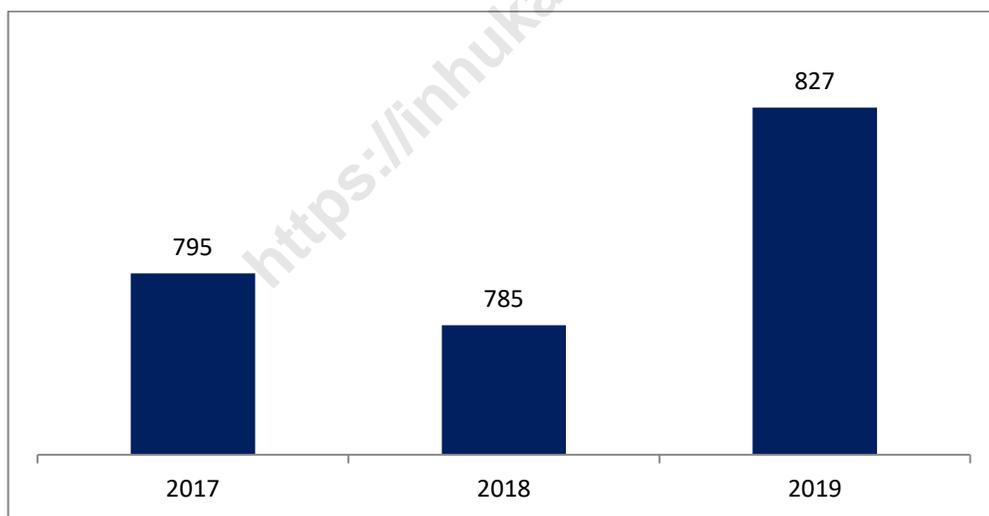
Selain fasilitas keamanan, jumlah personel yang dimiliki suatu wilayah juga berperan penting dalam menjaga kondisi keamanan di wilayah tersebut. Gambar 6 menunjukkan jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2019.



Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2017-2019 selalu di dominasi oleh laki-laki.

Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat membuat rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama untuk pengambilan keputusan penempatan personel polisi di suatu wilayah. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak optimal karena tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. Gambar 7 menunjukkan rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2019.



Gambar 7. Rasio Penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Tahun 2017-2019

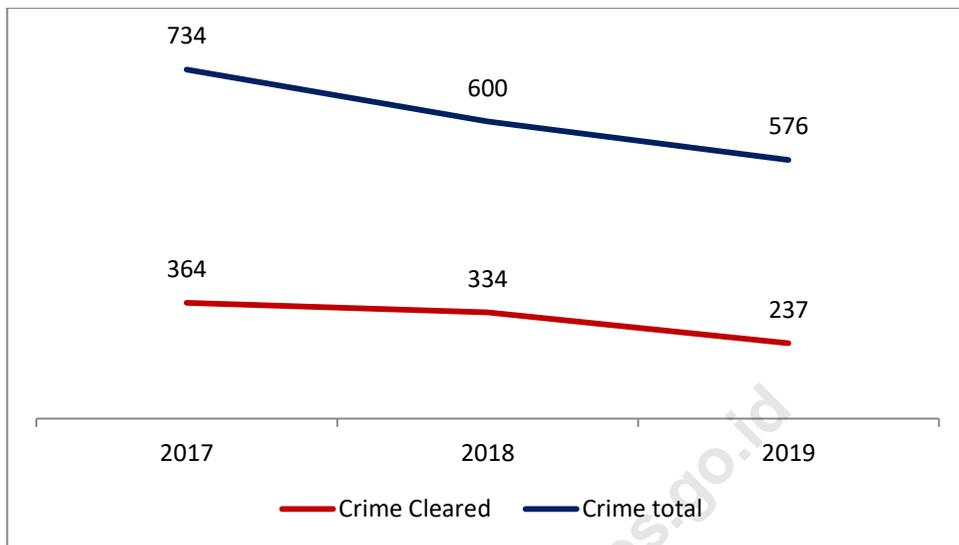
Berdasarkan Gambar 7, pada tahun 2019 satu orang personel polisi harus melayani 827 penduduk. Rasio ini naik dibandingkan tahun 2017 dan

2018 yang menunjukkan bahwa beban petugas personel polisi bertambah. Menurut PBB, rasio ideal polisi terhadap penduduk adalah 1:400, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu belum ideal. Oleh karena itu perlu adanya tambahan personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu sekitar dua kali lipat dari jumlah polisi saat ini.

4.2 INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN

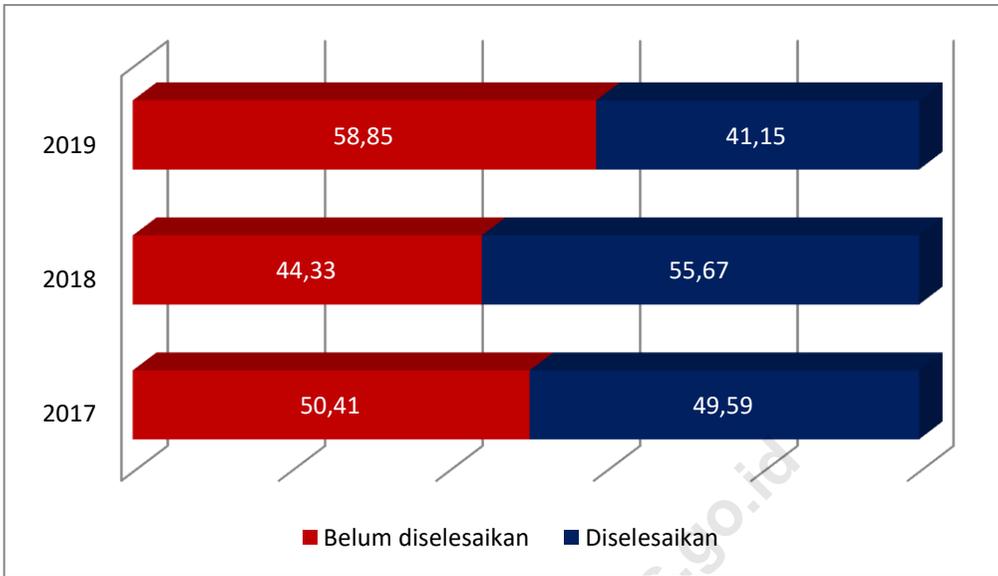
Data dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin masyarakat merasa tidak aman. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (*crime total*) Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 sebanyak 576 kasus, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 600 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 734 kasus. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu meningkat dari tahun 2017-2019.

Selain jumlah kejahatan, terdapat juga jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*). Dari 734 kasus yang dilaporkan tahun 2017, sebanyak 364 kasus dapat diselesaikan. Kemudian di tahun 2018, dari 600 kasus yang dilaporkan sebanyak 334 kasus berhasil diselesaikan. Kemudian dari 576 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019, sebanyak 237 kasus berhasil diselesaikan. Gambar 8 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan tahun 2017-2019. *Crime rate* adalah angka kejahatan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019, *crime rate* sebesar 130. Artinya, sebanyak 130 orang penduduk berisiko terkena kejahatan (per 100.000 penduduk).



Gambar 8. Jumlah kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) dan Kejahatan Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian pada tahun 2017, sekitar 49,59 persen perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*). Kemudian meningkat menjadi 55,67 persen di tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 41,15 persen di tahun 2019. Gambar 9 menunjukkan persentase perkara tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2019.



Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019

4.3 TINDAK KEJAHATAN MENURUT JENSISNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Berdasarkan data Kepolisian Kabupaten Indragiri Hulu, peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum sangat beragam, baik jenis maupun kuantitasnya. Banyaknya kasus kejahatan baik yang dilaporkan maupun yang diselesaikan di tahun 2018-2019 berdasarkan kelompok kejahatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Jika dilihat dari jenis kejahatannya, pada tahun 2019 tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian dengan pemberatan juga menempati peringkat pertama untuk tahun 2018 dengan 134 kasus. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 102 kasus. Dari 102 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan, hanya 69 kasus yang berhasil diselesaikan atau sekitar 67,64 persen. Selanjutnya,

kejahatan pencurian biasa yang menempati peringkat kedua terbanyak untuk tahun 2019 dengan 56 kasus. Untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor sejak tahun 2018 telah berada di tiga kejahatan terbanyak dengan 78 kasus. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan 51 kasus.

Hal yang harus diwaspadai selain dari jumlah kejahatan yang tinggi adalah kejahatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Penganiayaan berat, *illegal logging*, dan pemalsuan surat menjadi jenis kejahatan yang tergolong pada kelompok ini. Pada tahun 2019 kejahatan penganiayaan berat melonjak dengan cukup tajam dari nol kasus pada tahun 2018 menjadi 7 kasus di tahun 2019 tetapi semua kasus ini berhasil diselesaikan oleh kepolisian. Selain jumlah kejahatan yang mengalami kenaikan, juga terdapat kejahatan yang mengalami penurunan di tahun 2019. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, penganiayaan ringan, KDRT, dan pemerasan. Penganiayaan ringan mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 86 kasus di tahun 2018 menjadi nol kasus di tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu semakin meningkat dalam kurun waktu 2017-2019, meskipun demikian tetap diharapkan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa bekerja sama demi menekan jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tercipta Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih aman. Pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindak kejahatan dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan tindak kejahatan sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik.

4.4 KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Selain jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Polres Kabupaten Indragiri Hulu juga mencatat jumlah korban kejahatan menurut kelompok dan jenis kelamin. Informasi ini berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Tabel jumlah korban kejatan menurut kelompok dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 jenis kejahatan dengan korban terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah korban 102 orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 134 korban yang kesemua korbannya juga berjenis kelamin laki-laki. Jenis kejahatan selanjutnya yang memiliki korban terbanyak kedua adalah pencurian biasa dengan jumlah korban sebanyak 56 orang terdiri dari 41 laki-laki dan 15 perempuan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 51 korban dengan 30 laki-laki dan 21 perempuan. Jenis kejahatan dengan korban ketiga terbanyak adalah pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah korban 51 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 18 perempuan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2018 dengan 78 korban terdiri dari 55 laki-laki dan 23 perempuan.

Selain jenis kejahatan dengan jumlah korban terbanyak, jenis kejahatan yang perlu untuk diperhatikan adalah kejahatan dengan jumlah korban perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini mengingat kejahatan terhadap perempuan menjadi perhatian berbagai pihak baik

pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun swasta melalui berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu jenis kejahatan dengan korban perempuan terbanyak sebanyak 15 korban yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Perlu diberikan perhatian agar jumlah korban dapat ditekan untuk dimasa yang akan datang.

5

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilu legislatif tahun 2019 sebanyak 40 orang yang berasal dari 13 partai politik. Dari jumlah tersebut, hanya 3 persen anggota yang berjenis kelamin perempuan.
2. Jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD tahun 2019 berjumlah 6 Perda dengan tidak ada Perda Inisiatif yang dihasilkan.
3. Jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebanyak 50 organisasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 45 organisasi.
4. Fasilitas keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 terdiri dari 1 Polres, 10 Polsek, dan 7 pos polisi.
5. Rasio penduduk per polisi tahun 2019 sebesar 827, artinya satu orang personel polisi melayani 827 penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Angka jumlah kejahatan (*crime total*) tahun 2019 adalah sebanyak 576 kasus, dan sekitar 41,15 persen dapat diselesaikan (*clearance rate*).
7. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) tahun 2019 sebesar 130, artinya sebanyak 130 orang penduduk berisiko terkena kejahatan.
8. Selama tahun 2019 yang sering terjadi dan dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor.

Lampiran 1

JUMLAH KEJADIAN KEJAHATAN (LAPOR DAN SELESAI) TAHUN 2018 - 2019

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018		2019	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	2				
	KEJAHATAN KONVENSIONAL				
I.	1. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA	-	-	-	-
	2. TERHADAP MARTABAT DAN KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL	-	-	-	-
	3. TERHADAP NEGARA SAHABAT	-	-	-	-
	4. TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN	-	-	-	-
	5. TERHADAP KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-
	6. PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU	-	-	-	-
	7. MEMBAHAYAKAN KAM UMUM BAGI ORG/BARANG	-	-	-	-
	8. PEMBAKARAN	3	2	-	-
	9. KEBAKARAN	-	-	-	-
	10. TERHADAP KEKUASAAN UMUM	-	-	-	-
	11. MEMBERI SUAP	-	-	-	-
	12. SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	-	-	-	-
	13. PEMALSUAN MATA UANG	1	-	1	-
	14. PEMALSUAN MATERAI DAN MERK	-	-	-	-
	15. PEMALSUAN SURAT	-	-	2	2
	16. TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	-	-	-	-
	17. MERUSAK, MELANGGAR KESOPANAN/ KESUSILAAN DIMUKA UMUM	-	-	-	-
	18. PERKOSAAN	4	3	1	-
	19. PERJUDIAN	10	12	11	8
	20. MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG	-	-	-	-
	21. MELARIKAN WANITA DIBAWAH UMUR	-	-	-	-
	22. PENGHINAAN	1	3	-	-
	23. MEMBUKA RAHASIA	-	-	-	-

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018		2019	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	2				
	24. PENCULIKAN	-	-	-	-
	25. PEMBUNUHAN	2	4	3	5
	26. PENGANIAYAAN BERAT	-	-	7	7
	27. PENGANIAYAAN RINGAN	86	72	-	-
	28. MENGAKIBATKAN LUKA KARENA ALPA	-	-	-	-
	30. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	7	6	4	4
	31. PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	134	61	102	69
	32. PENCURIAN BIASA	51	41	56	46
	33. PENCURIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA	-	-	-	1
	34. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	78	16	51	7
	35. PEMERASAN	3	3	6	4
	36. PENGANCAMAN	2	3	-	-
	37. PENGGELAPAN	57	29	43	27
	38. PENIPUAN	25	21	21	6
	39. PENGRUSAKAN	9	9	-	-
	40. MEMBERI SUAP	-	-	-	-
	41. PELAYARAN DAN PENERBANGAN	-	-	-	-
	42. PENYEROBOTAN TANAH	3	3	4	2
	43. KDRT	21	21	15	14
	44. NARKOTIKA	-	-	-	-
	45. LAIN-LAIN	-	-	5	16
	KEJAHATAN TRANS NASIONAL				
	1. TEROR	-	-	-	-
	2. PENYELUNDUPAN	-	-	-	-
	3. PENYELUNDUPAN SENPI DAN HANDAK	-	-	-	-
	4. PENYELUNDUPAN MANUSIA	-	-	-	-
	5. PEROMPAKAN LAUT	-	-	-	-
	6. PENCUCIAN UANG	-	-	-	-
	7. CYBER CRIME	-	-	1	1
	8. H A K I	-	-	-	-
	9. PERBANKAN	1	1	-	-
	10. LAIN-LAIN	-	-	-	-
III.	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI				

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018		2019	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	2				
	1. KERUSUHAN MASSAL	-	-	-	-
	2. KONFLIK ETNIS	-	-	1	1
	3. SEPARATISME	-	-	-	-
	4. LAIN-LAIN	-	-	2	2
IV.	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA				
	1. KORUPSI	3	-	-	3
	2. ILLEGAL LOGGING	3	4	5	3
	3. LAIN-LAIN	-	-	9	9
JUMLAH		504	334	350	237

Lampiran 2

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018 - 2019

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018			2019		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
01	2						
	KEJAHATAN KONVENSIONAL						
I.	1. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA	-	-	-	-	-	-
	2. TERHADAP MARTABAT DAN KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL	-	-	-	-	-	-
	3. TERHADAP NEGARA SAHABAT	-	-	-	-	-	-
	4. TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN	-	-	-	-	-	-
	5. TERHADAP KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-
	6. PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU	-	-	-	-	-	-
	7. MEMBAHAYAKAN KAM UMUM BAGI ORG/BARANG	-	-	-	-	-	-
	8. PEMBAKARAN	3	-	3	-	-	-
	9. KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-
	10. TERHADAP KEKUASAAN UMUM	-	-	-	-	-	-
	11. MEMBERI SUAP	-	-	-	-	-	-
	12. SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	-	-	-	-	-	-
	13. PEMALSUAN MATA UANG	1	-	1	1	-	1
	14. PEMALSUAN MATERAI DAN MERK	-	-	-	-	-	-
	15. PEMALSUAN SURAT	-	-	-	2	-	2
	16. TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-
	17. MERUSAK, MELANGGAR KESOPANAN/ KESUSILAN DIMUKA UMUM	-	-	-	-	-	-
	18. PERKOSAAN	-	4	4	-	1	1
	19. PERJUDIAN	10	-	10	11	-	11
	20. MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG	-	-	-	-	-	-

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018			2019		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
01	2						
	21. MELARIKAN WANITA DIBAWAH UMUR	-	-	-	-	-	-
	22. PENGHINAAN	1	-	1	-	-	-
	23. MEMBUKA RAHASIA	-	-	-	-	-	-
	24. PENCULIKAN	-	-	-	-	-	-
	25. PEMBUNUHAN	2	-	2	1	2	3
	26. PENGANIAYAAN BERAT	-	-	-	2	5	7
	27. PENGANIAYAAN RINGAN	51	35	86	-	-	-
	28. MENGAKIBATKAN LUKA KARENA ALPA	-	-	-	-	-	-
	30. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	4	3	7	3	1	4
	31. PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	134	-	134	102	-	102
	32. PENCURIAN BIASA	30	21	51	41	15	56
	33. PENCURIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA	-	-	-	-	-	-
	34. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	55	23	78	33	18	51
	35. PEMERASAN	3	-	3	4	2	6
	36. PENGANCAMAN	2	-	2	-	-	-
	37. PENGGELAPAN	57	-	57	43	-	43
	38. PENIPUAN	25	-	25	21	-	21
	39. PENGRUSAKAN	9	-	9	-	-	-
	40. MEMBERI SUAP	-	-	-	-	-	-
	41. PELAYARAN DAN PENERBANGAN	-	-	-	-	-	-
	42. PENYEROBOTAN TANAH	3	-	3	4	-	4
	43. KDRT	-	21	21	-	15	15
	44. NARKOTIKA	-	-	-	-	-	-
	45. LAIN-LAIN	-	-	-	5	-	5
	KEJAHATAN TRANS NASIONAL						
II.	1. TEROR	-	-	-	-	-	-
	2. PENYELUNDUPAN	-	-	-	-	-	-
	3. PENYELUNDUPAN SENPI DAN HANDAK	-	-	-	-	-	-
	4. PENYELUNDUPAN MANUSIA	-	-	-	-	-	-
	5. PEROMPAKAN LAUT	-	-	-	-	-	-
	6. PENCUCIAN UANG	-	-	-	-	-	-
	7. CYBER CRIME	-	-	-	-	1	1

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2018			2019		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
01	2						
	8. H A K I	-	-	-	-	-	-
	9. PERBANKAN	1	-	1	-	-	-
	10. LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
III.	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI						
	1. KERUSUHAN MASSAL	-	-	-	-	-	-
	2. KONFLIK ETNIS	-	-	-	1	-	1
	3. SEPARATISME	-	-	-	-	-	-
	4. LAIN-LAIN	-	-	-	2	-	2
IV.	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA						
	1. KORUPSI	3	-	3	3	-	3
	2. ILLEGAL LOGGING	3	-	3	5	-	5
	3. LAIN-LAIN	-	-	-	9	-	9
JUMLAH		397	107	504	293	60	353

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<https://inhukab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

JALAN BATU CANAI KELURAHAN PEMATANG REBA INDRAGIRI HULU
TELP. (0769) 34125
HTTP://INHUKAB.BPS.GO.ID EMAIL : BPS1402@BPS.GO.ID

ISBN 978-602-6732-65-1 (PDF)

